

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

06

Pendidikan Vokasi di SMK
Cetak Tenaga Kerja
Siap Pakai Secara Global

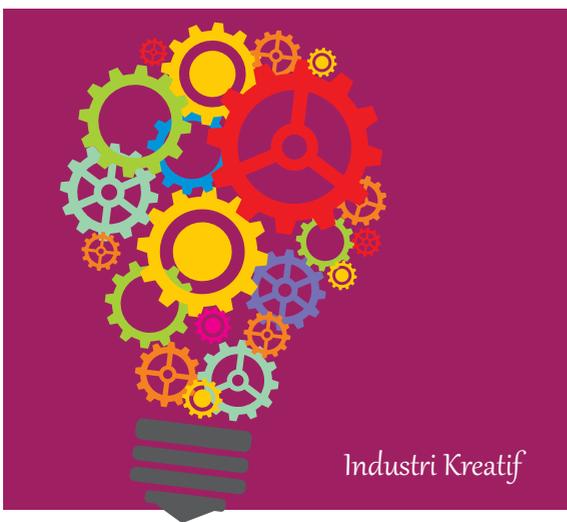
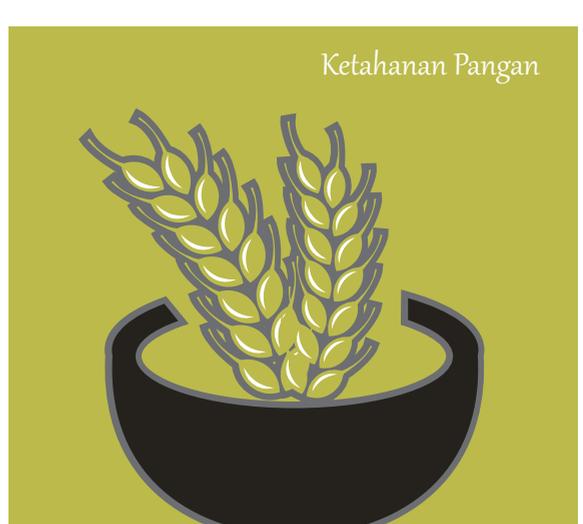
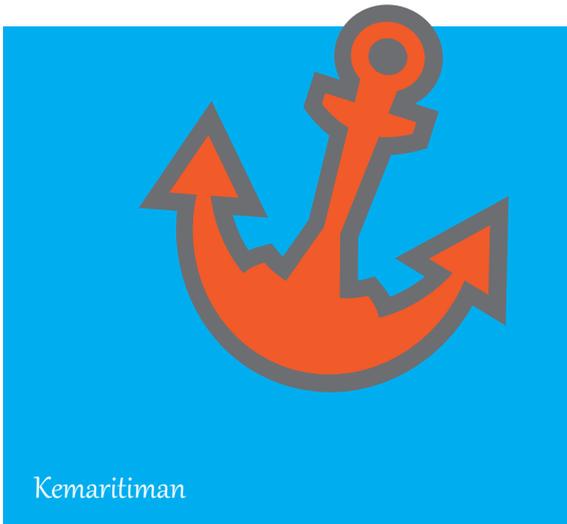
10

Fokus Pengembangan
SMK di Lima Sektor
Unggulan

16

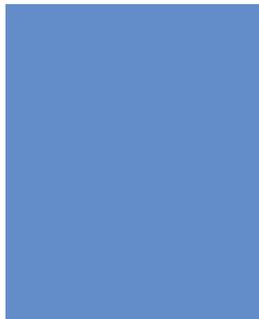
Raih Masa Depan,
Manfaatkan Bursa
Kerja Khusus

V / September - 2016



**Mencetak *SDM Terampil*
*Berstandar Internasional***

DAFTAR ISI



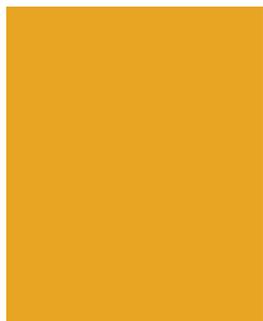
SALAM
PAK
MENTERI 04

Pendidikan Vokasi
di SMK Cetak Tenaga
Kerja Siap Pakai
Secara Global 06

Fokus Pengembangan
SMK di Lima Sektor
Unggulan 10



Proposal Elektronik
Buka Kesempatan
yang Sama Bagi
Setiap SMK untuk
Dapatkan Bantuan
12



Guru Produktif SMK
Lima Langkah
Kemendikbud Jawab
Kekurangan Guru
Produktif SMK 13

Raih Masa Depan,
Manfaatkan Bursa
Kerja Khusus 16

Padanan
Kata 32



SMK Rujukan
Hasilkan SDM
Terampil dan Berdaya
Saing Tinggi 18

Dari Pinggiran
Merajut
Budaya Nasional
21

Penulisan Kata
yang Tepat 34

Senarai Kata
Serapan 33

Sapa Redaksi

Persaingan tenaga kerja semakin terbuka seiring dengan pemberlakuan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak akhir 2015 yang lalu. Tuntutan mencetak tenaga kerja siap pakai, terampil, dan profesional tidak bisa ditunda lagi. Untuk itulah SMK sebagai satuan pendidikan formal di bidang vokasi perlu diperkuat. Itu karena SMK mencetak lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Instruksi penguatan itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo.

Penguatan dilakukan dengan cara reorientasi pendidikan vokasi ke arah kebutuhan kerja yang tentunya melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Ada sektor-sektor unggulan yang difokuskan oleh Presiden, yaitu maritim, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Presiden menilai, sektor-sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup banyak.

Untuk itulah, pada majalah edisi V ini secara khusus kami membahas mengenai SMK, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan beragam pilihan program keahlian. Ulasan kami awali dengan pentingnya pendidikan vokasi sehingga mendapat perhatian dari Presiden. Pada fokus berikutnya, kami berpindah pada ulasan tentang bagaimana sekolah dapat mengajukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Pengajuan bantuan untuk tahun 2017 bisa dilakukan melalui elektronik, tidak lagi dalam bentuk proposal yang tidak jarang membutuhkan upaya lebih besar untuk membuatnya.

Ulasan berlanjut ke penjelasan singkat tentang sektor-sektor unggulan SMK yang ternyata masih banyak dibutuhkan di dunia kerja. Peluang kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor unggulan, yaitu maritim, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, cukup besar, sementara tidak dibarengi dengan jumlah lulusan yang memadai pada bidang-bidang tersebut. Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan, sehingga Kemendikbud mendorong daerah-daerah membangun SMK yang disesuaikan dengan potensi lokal yang ada di daerah tersebut.

Ada pula penjelasan tentang guru produktif SMK, Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dapat dimanfaatkan lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dan informasi tentang SMK Rujukan. Semua kami kupas dengan menyertakan infografis menarik yang diharapkan memudahkan pembaca memahami isi bahasan tersebut.

Pada rubrik Kebudayaan, kami memiliki artikel tentang budaya lokal pinggiran yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Fungsinya yang juga penting sebagai perekat kebudayaan nasional tidak boleh dianggap sebelah mata. Seperti permainan tradisional yang sarat akan nilai budaya.

Akhir kata, kami berharap majalah edisi V kali ini dapat menjadi referensi bagi pembaca budiman tentang pendidikan vokasi dan SMK. Sejumlah data yang kami sajikan dapat dikutip sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan menjadi rujukan bagi mereka yang membutuhkan. Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Penanggung Jawab: Asianto Sinambela

Pemimpin Redaksi: Eka Nugrahini

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi:

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),

Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,

Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,

Telp. 021-5711144 Pes. 2413

 kemdikbud.go.id

 [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/kemdikbud.ri)

 [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)

 [KEMENDIKBUD RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)



SALAM PAK MENTERI

“ Pada tahun 2030 nanti Indonesia memerlukan 58 juta tenaga kerja terampil. Sedangkan di Asean, sampai tahun 2025 akan membuka 14 juta lapangan tenaga kerja. Itulah peluang sekaligus tantangan. Jadi tidak salah jika Nawacita secara eksplisit menyebut SMK sebagai salah satu yang harus dipertajam dan dikuatkan. ”

Berbahagialah anak-anak sekarang yang saat nanti pada tahun 2045 akan berusia relatif masih muda. Tepat pada tahun itu kita akan memperingati satu abad kemerdekaan Republik Indonesia dan anak-anak kita berada pada puncak usia produktif. Untuk itu kita persiapkan mereka sebaik mungkin menjadi Generasi Emas di tahun 2045.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dituangkan dalam bidang pendidikan Nawacita, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Selain itu juga membangun sejumlah *science and technopark* di kawasan politeknik dan SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Demikian pula dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana pada tahun 2030 menekankan pertumbuhan generasi muda yang memiliki keahlian yang relevan baik teknik maupun vokasional untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kewirausahaan (*enterpreneurship*).

Baik Nawacita maupun SDGs tersebut sangat relevan untuk menjawab tantangan ke depan. Pada tahun 2030 nanti Indonesia memerlukan 58 juta tenaga kerja terampil. Sedangkan di Asean, sampai tahun 2025 akan membuka 14 juta lapangan tenaga kerja. Itulah peluang sekaligus tantangan. Bagaimanapun, saat ini kita masih memiliki 7,56 juta total pengangguran terbuka, dan 20,76% di antaranya berpendidikan SMK (BPS, 2015). Oleh sebab itu



Nawacita secara eksplisit menyebut SMK sebagai salah satu yang harus dipertajam dan dikuatkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi salah satu tumpuan harapan untuk menyiapkan Generasi Emas. Melalui Inpres nomor 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud mendapatkan enam tugas terkait SMK. Yakni, membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan penyempurnaan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan; meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dunia usaha/industri; serta meningkat akses sertifikasi



lulusan dan akreditasi SMK dan membentuk kelompok kerjapengembang SMK. Keenam tugas itu kini sedang dijadikan prioritas serius agar kita tidak terlambat mempersiapkan sumber daya manusia terampil yang siap bersaing di pasar internasional.

Maka yang mendesak untuk dilakukan adalah segera beranjak dari zona nyaman. Jangan cepat puas dengan keunggulan komparatif dari sumber daya alam kita. SMK harus bisa lebih hebat lagi. Persoalan-persoalan keterbatasan jumlah dan kompetensi guru, minimnya sarana dan prasarana, kurang sesuai kondisi geografis dengan jurusan yang dimiliki, tidak selarasnya kompetensi lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri harus diatasi. Segala kekuatan harus kita kerahkan untuk menjamin penyiapan Generasi Emas yang unggul dan kompetitif.

Jika semua tekad kita itu laksanakan, insya Allah pada tahun 2030 ekonomi kita akan masuk peringkat 7 dunia dengan tambahan 58 juta pekerja yang andal (*skilled workers*). Potensi negeri kita yang melimpah akan semakin maju pesat dengan prioritas pengembangan SMK terutama di bidang-bidang Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian dan Industri Kreatif. Saya yakin dengan gotong royong semua lapisan masyarakat kita akan dengan mudah mencapai semua harapan itu.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridai niat mulia kita. Amin. [*]

Pendidikan Vokasi di SMK Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai Secara Global

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang mandiri dalam bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Di bidang pendidikan, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus untuk mewujudkan Nawa Cita tersebut. Pendidikan vokasi dianggap sebagai salah satu solusi dalam perwujudan Nawa Cita, khususnya nomor 5 dan 6.

Nawa Cita nomor 5 mencantumkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Kemudian dalam Nawa Cita nomor 6 tercantum bahwa pemerintah akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Salah satu yang akan dilakukan untuk mewujudkan Nawa Cita nomor 6 itu adalah dengan membangun sejumlah *science park* dan *techno park* di daerah-daerah, politeknik, dan SMK-SMK dengan sarana dan prasarana dengan teknologi terkini.

Mengapa pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi dinilai sebagai pendidikan yang sangat diperlukan sekarang untuk menjawab kebutuhan pasar, sekaligus untuk menghadapi era kompetisi seperti saat ini, misalnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai

sejak tahun 2015. Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

“Mengenai kesiapan sumber daya manusia kita dalam berkompetisi, memang harus dipersiapkan. Sebab, kalau tidak dipersiapkan, kita akan ketinggalan terus,” ujar Presiden Jokowi saat acara Dialog Publik Bersama Presiden yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Maret lalu.

Pendidikan vokasi merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam pendidikan vokasi terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (*apprenticeship of learning*) pada kejuruan-kejuruan khusus (*specific trades*). Karena itu Presiden Jokowi melihat pendidikan vokasi/kejuruan

sangat penting untuk mempersiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Keseriusan pemerintah dalam penguatan pendidikan vokasi salah satunya dibuktikan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jerman untuk mengetahui keberhasilan Jerman dalam pendidikan vokasi. Fokus





kunjungan kerja presiden ke Jerman adalah menjalin kerja sama dan mendapat dukungan pemerintah Jerman dalam pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasi di Indonesia.

Jerman dianggap sebagai negara yang sangat bagus dalam mengembangkan sistem pendidikan kejuruan, sehingga generasi mudanya memiliki keterampilan yang memadai sejak

dini. Hal itu pula yang membuat angka pengangguran di Jerman sangat rendah.

Saat kunjungan kerja di Jerman, Presiden Jokowi meninjau Pusat Pelatihan Pendidikan Vokasi Profesional di Siemestadt, yaitu semacam sekolah dan tempat pelatihan berbagai bidang kejuruan yang sangat berkembang di Jerman. Di Siemestadt, Presiden mendapatkan informasi umum terkait pendidikan kejuruan dual

training di Jerman. Pendidikan kejuruan dual training adalah pendidikan yang berorientasi kerja dan mengharuskan para siswa/peserta belajar di dua tempat pembelajaran, yaitu di sekolah dan di industri, sehingga terjadi sinergi antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri.

Presiden melihat adanya kemungkinan Indonesia dapat menerapkan sistem yang sama dengan Siemestadt dalam pendidikan vokasi. Karena itu sebagai tindak lanjut dari

kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan akan mengirimkan tim ke Indonesia untuk membantu pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Di dalam negeri, usaha penguatan pendidikan vokasi dilakukan pemerintah dengan menjalin koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan kementerian/lembaga terkait, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pemerintah saat ini sedang merumuskan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional. Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional terdiri dari lintas kementerian /lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) K/L terkait. Tiga kementerian utama dalam penguatan pendidikan vokasi adalah Kemendikbud, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Pendidikan vokasional kita garap besar-besaran, yaitu SMK dan politeknik. Pendidikan kejuruan itu akan menjadi pusat pelatihan bagi siswa yang akan masuk ke dunia kerja. Ke depan, pelatihan harus lewat institusi-institusi ini,” ujar Presiden.

Selain dari kementerian terkait, anggota Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasional juga diambil dari Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian/lembaga lainnya.



Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK

Pertengahan September 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Secara khusus, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melaksanakan enam hal, yaitu:



Sebelum tiga tim di atas dibentuk, Kemendikbud dan Kemenko PMK serta beberapa kementerian terkait telah membahas tiga jalur dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasional, yakni Revitalisasi SMK, Revitalisasi Politeknik dan Akademi Kejuruan, dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Program Magang Bersertifikat.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi, Kemendikbud memimpin Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK, Kemristekdikti akan mengepalai Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Politeknik dan Akademi, dan Kemenaker akan memimpin Tim Penyusun Peta Jalan Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Magang/Kerja Praktik.

Selain itu telah dibahas juga mengenai 12 Sektor Prioritas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan kebutuhan industri dalam negeri dalam melakukan Revitalisasi Pendidikan Vokasional. (*)



Membuat peta jalan pengembangan SMK



Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match)



Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK



Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri



Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK



Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK

Fokus Pengembangan SMK di Lima Sektor Unggulan

Percepatan pembangunan pendidikan vokasi lewat SMK difokuskan pada potensi besar yang dimiliki Indonesia. Bidang kemaritiman yang terdiri dari perikanan dan kelautan; bidang pariwisata; bidang pertanian; serta bidang industri kreatif adalah lima sektor unggulan yang jika potensinya diolah dengan baik dapat membuka peluang usaha dan bursa tenaga kerja siap pakai.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kemendikbud, Mustaghfirin Amin mengatakan, besarnya potensi Indonesia terutama di lima bidang tersebut diibaratkan seperti air di atas gunung. "Kalau tidak dialirkan untuk menggerakkan listrik, itu hanya akan jadi potensi, sama seperti ikan di laut, yang meskipun banyak tapi jika tidak ada yang bisa mengolah, ikannya akan lari kemana-mana," katanya.

Dalam menyiapkan lulusan terampil dan kompeten dari SMK, pemerintah menambah fasilitas belajar dengan menambah unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan sarana prasarana pendukung lainnya. "Jadi perkembangannya bisa kita lihat, di 2010 jumlah SMK sepuluh ribuan, sekarang sudah 13 ribuan," katanya di Jakarta, Agustus 2016.

Di samping itu, pemerintah melakukan inventarisasi dan identifikasi unsur potensi yang dimiliki hingga kebutuhan infrastruktur dan pembinaan. Di bidang kemaritiman

Sebagai bagian dari program pembinaan, Direktorat PSMK sudah memfokuskan pada 4 (empat) program prioritas, yakni SMK Kemaritiman, SMK Ketahanan Pangan, SMK Pariwisata, dan SMK Industri Kreatif.

misalnya, pemetaan percepatan pembangunan bidang kemaritiman didukung dengan identifikasi dan inventarisasi industri dan jasa maritim. Industri berbasis kelautan yang telah diinventarisasi antara lain industri perikanan, industri berbasis potensi sumber daya lokal, industri pariwisata bahari, industri jasa transportasi, dan perdagangan.

PERBANDINGAN KEBUTUHAN



Teknologi dan Rekayasa

Kebutuhan:
638.652

Lulusan:
445.047

Kekurangan:
193.605



Kesehatan

Kebutuhan:
68.245

Lulusan:
60.944

Kekurangan:
7.301



Perikanan dan Kelautan

Kebutuhan:
3.364.297

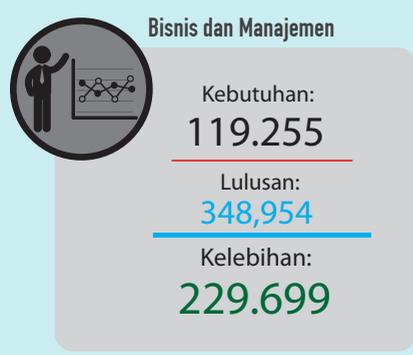
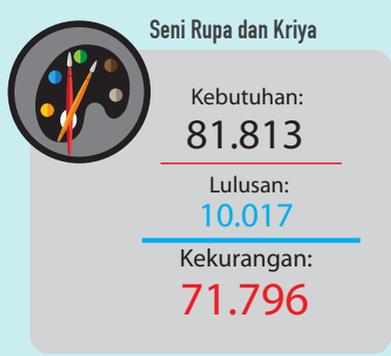
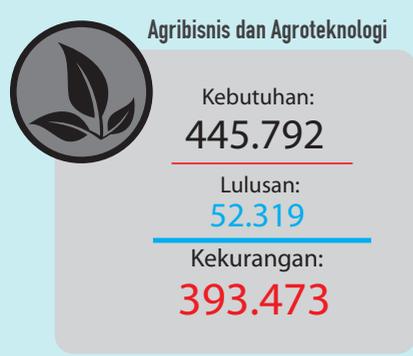
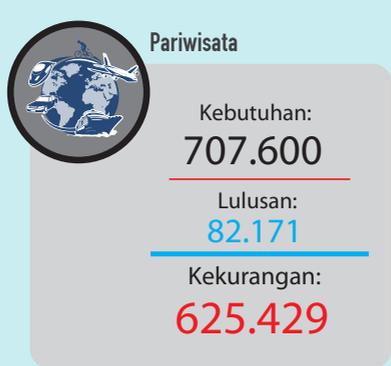
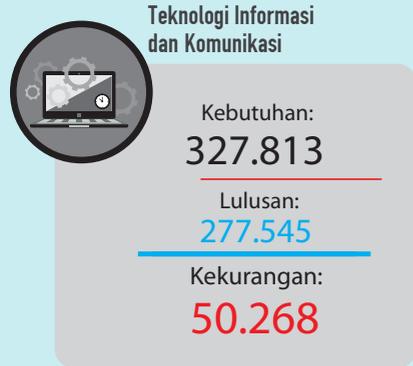
Lulusan:
17,249

Kekurangan:
3.347.048

Ada juga pengembangan 450 SMK unggulan di bidang maritim melalui dukungan untuk ruang kelas dan ruang bengkel, pembaruan peralatan, teaching factory, dan asrama.

Dukungan pembinaan untuk semua bidang dimulai dari revitalisasi SMK yang ada, termasuk penambahan program di SMK. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk membangun unit sekolah baru (USB) SMK di daerah dengan

TENAGA KERJA DENGAN LULUSAN SMK 2016



Sumber Data: Dapodik, Akses 3 Agustus 2016

potensi tinggi. Untuk penguatan kelembagaan, tata kelola institusi, sertifikasi lulusan dan peningkatan kebermanfaatan, dibangun sektor kewirausahaan yang berbasis keunggulan lokal.

Di bidang pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata didasarkan pada preferensi, analisis perilaku, psikografik, serta tarikan pasar. Untuk itu, merevitalisasi program keahlian di SMK Pariwisata dilakukan agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu industri pariwisata.

Lulusan SMK secara umum diharapkan dapat mendorong pelibatan peran aktif dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wilayah setempat. Dengan demikian, keberadaannya dapat memberikan manfaat dan keberlanjutan sumber daya yang ada.

Pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah melibatkan berbagai pihak (lintas sektor). Kerja sama antar kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) terus

dilakukan. Keberadaan SMK yang berada di wilayah kerja pemerintah daerah memerlukan peran aktif dan keseriusan pemda untuk benar-benar menganalisis kebutuhan dan peta SMK yang berada di daerahnya. Dari analisis tersebut, arah pembangunan sebuah wilayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada. [*]

Proposal Elektronik Buka Kesempatan yang Sama Bagi Setiap SMK untuk Dapatkan Bantuan

Terhitung awal Tahun Pelajaran 2016/2017, Kemendikbud menerima pengajuan proposal untuk bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) melalui proposal elektronik yang terintegrasi dengan data pokok pendidikan (dapodik). Bantuan RKB akan diberikan berdasarkan data dapodik yang sudah diverifikasi melalui aplikasi Verifikasi Wilayah (verwil) SMK.

Verifikasi Wilayah (verwil) adalah kegiatan pembaharuan, pemeriksaan, dan pembuktian kebenaran data dan informasi SMK yang dilaksanakan secara terpadu untuk semua jenis program bantuan dari Direktorat PSMK. Pemutakhiran data dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh SMK. Sedangkan kegiatan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran data dilakukan dengan mengambil sampel acak pada beberapa SMK.

Setiap kabupaten/kota mendapatkan dua akses untuk masuk ke aplikasi verwil. Kedua akses tersebut diberikan kepada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

Proposal elektronik mencakup seluruh bantuan yang dikururkan Kemendikbud melalui Direktorat

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK), kecuali bantuan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB). Pemohon bantuan (sekolah) dapat mengisi data usulan kebutuhan pada suatu instrumen khusus secara daring, pengganti proposal tercetak. Dengan sistem ini harapannya akan lebih terpetakan kebutuhan di sekolah, karena setiap sekolah memperoleh kesempatan yang sama.

"Kalau dulu, hanya sekolah yang pandai membuat proposal saja yang bisa dapat bantuan. Sekarang, dengan berbasis data semua berkesempatan sama," kata Direktur Pembinaan SMK Mustaghfirin Amin, di Jakarta, Agustus 2016.

Instrumen bantuan untuk SMK ini dirancang khusus sesuai dengan bantuan yang tersedia. Aplikasi verwil memudahkan SMK mengajukan permohonan bantuan

yang kemudian antara kepala sekolah, MKKS SMK, serta dinas sama-sama melakukan verifikasi dan kebutuhan bantuan yang dibutuhkan.

Ketepatan pemutakhiran data yang dimasukkan oleh sekolah akan memengaruhi ketepatan dan kebenaran dana bantuan yang akan diberikan. Kebenaran pemutakhiran data di semester pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari siswa dan PTK (sebagai sumber data), kepala sekolah (sebagai penanggung jawab dapodik sekolah), dan operator dapodik (sebagai petugas yang memasukkan data). [*]

Aplikasi Verwil SMK diakses di psmk.kemdikbud.go.id/verwil/

12

Ayo Usulkan bantuan tahun 2017 untuk sekolah dengan mengisi verifikasi wilayah!



Bagi ketua MKKS dan Dinas Pendidikan Kab/Kota yang belum memiliki username dan password, segera kirim email ke helpdesk.psmk@kemdikbud.go.id

Bagi yang telah memiliki username dan password, segera akses laman psmk.kemdikbud.go.id/verwil

Guru Produktif SMK

Lima Langkah Kemendikbud Jawab Kekurangan Guru Produktif SMK

Sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan, kebutuhan akan guru produktif di SMK sangat penting. Sayangnya, keberadaan guru produktif di SMK masih kurang dari cukup. Jumlah guru produktif SMK saat ini baru sekitar 80.000 dari jumlah 279.843 guru SMK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya menjawab persoalan tersebut.



13

Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mustagfirin Amin mengatakan, setidaknya ada lima langkah yang dilakukan untuk menambah jumlah guru produktif di SMK. Pertama, dengan memanfaatkan tenaga ahli industri yang kompeten untuk mengajar. Mustagfirin menyebut, pihaknya akan membuat aturan penyetaraan bagi para tenaga ahli

industri ini agar mendapat pengakuan, sehingga memiliki wewenang dan berhak mengajar di pendidikan formal.

“Kami tengah merancang aturan itu, karena harus sesuai dengan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI). Dengan aturan itu, nanti seorang ahli berhak mengajar dengan statusnya sebagai guru,” ungkap Mustagfirin.

Kedua, melakukan alih fungsi guru-guru yang mengampu mata pelajaran umum. Menurut Mustagfirin, guru-guru ini akan dilatih ulang selama beberapa semester agar dapat mengajar pada bidang kejuruan dan menjadi guru produktif. “Misalnya sarjana kimia, dialihfungsikan menjadi sarjana kimia industri. Kemudian, sarjana biologi murni, dialihfungsikan menjadi sarjana pertanian,” tuturnya.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan pemetaan penyaluran guru produktif, sehingga tidak terjadi daerah yang satu kekurangan, sementara daerah yang lain memiliki jumlah berlebih. "Ini sedang kami petakan, bagian mana yang kurang dan perlu berapa gurunya. Jika tidak dapat dipenuhi, maka langkah keempat, yaitu tidak ada cara lain selain pengadaan guru. Ini akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," jelasnya.

Selanjutnya, langkah kelima adalah memberikan kewenangan bagi guru untuk mengajar bidang kedua yang berdekatan dengan keilmuannya. Contohnya, guru ekonomi, dapat mengajar pada bidang perbankan, dan lainnya.

Langkah lain yang tengah dipikirkan untuk menjawab

Salah satu cara menjawab tantangan kekurangan guru produktif SMK adalah dengan melakukan alih fungsi guru-guru yang mengampu mata pelajaran umum. Misalnya sarjana kimia dialihfungsikan menjadi sarjana kimia industri. Sarjana biologi murni dialihfungsikan menjadi sarjana pertanian.

persoalan kuantitas dan kualitas guru produktif adalah pembelajaran dengan menggunakan *virtual teacher*. "Kami juga sedang berpikir tentang pembelajaran

5 Upaya Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Guru Kejuruan

Berbagai upaya terus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menambah jumlah guru produktif SMK. Diharapkan dengan berbagai upaya yang ada, perbandingan antara guru produktif dan guru mata pelajaran umum di SMK bisa mencapai 50:50 hingga 2020



Kualitas, Kuantitas Guru

- Penambahan formasi guru kejuruan
- Pemanfaatan tenaga ahli industri
- Pemanfaatan mahasiswa tingkat akhir sebagai guru bantu
- Pelaksanaan rekognisi pengalaman lampau (RPL)
- Memanfaatkan teknologi ICT



Pelatihan Guru Berkelanjutan

- Training guru di P4TK dan industri berjenjang kontinyu
- Pendampingan guru di sekolah dalam proses pembelajaran

melalui virtual teacher. Jadi sejumlah materi pembelajaran kejuruan dilakukan dalam bentuk maya, bisa jadi animasi atau video, sehingga kalau ada kekurangan jumlah guru atau kualitas guru yang kurang, siswa dapat mengakses ke *virtual teacher* ini. Misalnya video cara mengelas. Memang ada plus-minusnya. Plusnya, bisa diakses di mana-mana. Minusnya, nirperasaan, artinya harus ada keinginan kuat dari sekolah atau siswa agar yang bersangkutan mau mengikuti pembelajaran di video itu," ungkapnya.

Mustagfirin menambahkan, idealnya proporsi antara guru mata pelajaran umum (atau biasa disebut guru normatif dan adaptif) dengan guru produktif 50:50. Untuk itu secara bertahap kebutuhan itu akan terus tambah hingga diharapkan pada 2020, proporsi ideal tersebut dapat terpenuhi.

Selain jumlah guru yang perlu terus ditambah seiring dengan penambahan siswa SMK sehingga memenuhi rasio guru-murid 1:30, kompetensi guru juga akan

ditingkatkan. Tidak hanya itu, pengetahuan guru juga harus senantiasa sesuai dengan perkembangan teknologi. Diperlukan pula pendampingan guru dari industri agar transfer ilmu berjalan dengan baik. (*)



Program Magang Guru

- Program teaching factory di SMK
- Program magang di industri bagi guru kejuruan secara periodik

15



Profesionalisme Instruktur

- Pemanfaatan tenaga ahli dari DUDI sebagai instruktur
- Penerapan RPL
- Pemanfaatan ICT
- Pelatihan/upgrading skills pengelola LKP secara berkelanjutan
- Pemagangan instruktur di DUDI



Profesionalisme Pengelola Lembaga LKP

- Pemanfaatan ICT
- Pelatihan/upgrading skills pengelola LKP secara berkelanjutan
- Pemagangan pengelola pada LKP
- Rujukan/Akreditasi A

Sumber: Paparan Mendikbud dalam Rapat Revitalisasi Pendidikan Kejuruan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 24 Agustus 2016

Raih Masa Depan, Manfaatkan Bursa Kerja Khusus

Selama tiga atau empat tahun, SMK mempersiapkan siswa-siswinya untuk memasuki dunia kerja. Para siswa ditempa berbagai ilmu dan keahlian khusus sesuai dengan bidang keahlian yang diambil. Namun, setelah lulus mereka seolah kehilangan arah menemukan langkah hidup selanjutnya di dunia kerja terlebih lagi sejak tahun lalu Indonesia telah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Negara yang dapat memproduksi tenaga unggul dan mampu bersaing yang akan menguasai pasar ASEAN,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 1,35 juta lulusan SMK belum mendapatkan pekerjaan dari total 7,02 juta pengangguran di Indonesia pada Februari 2016. Salah satu upaya pemerintah menurunkan angka itu di antaranya melalui pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di masing-masing satuan pendidikan menengah khususnya SMK.

Metode pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi bagi siswa memang perlu terus dikembangkan tetapi pendirian BKK di setiap SMK perlu bagi keberlangsungan hidup lulusannya di masa depan. Karena keberhasilan pendidikan di SMK sering dikaitkan dengan jumlah tamatannya yang telah bekerja atau berwirausaha.

Melalui BKK, tamatan SMK mendapatkan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha atau dunia industri bahkan sampai pada tahap penyaluran atau penempatannya. Selain itu, BKK pun dapat memberikan bimbingan kepada mereka yang ingin berusaha mandiri atau menciptakan lapangan kerjanya sendiri.

BKK juga bermanfaat bagi dunia usaha atau dunia industri dalam mencari tenaga kerja terampil sesuai kualifikasi keahlian lulusan SMK yang dibutuhkan. Namun, BKK tidak boleh menyalurkan para pencari



kerja yang bukan alumni SMK tersebut. Dengan begitu keberadaan tamatan SMK mudah dideteksi dan dievaluasi sebarannya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan telah berupaya membangun program aplikasi BKK dalam jejaring (online). Teknologi informasi itu dibuat agar menyinergikan lulusan SMK dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri di seluruh Indonesia.

Sekolah atau lulusan SMK dapat mengakses laman <http://psmk.kemdikbud.go.id/bkk> untuk mencari dunia usaha atau dunia industri yang menyediakan lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Sebaliknya, dunia usaha atau dunia industri pun dapat mencari tenaga kerja lulusan SMK sesuai kebutuhannya. Tunggu apalagi, ayo manfaatkan aplikasi Bursa Kerja Khusus untuk masa depanmu yang gemilang! (*)



Kegiatan BKK berdasarkan mekanisme antar kerja meliputi:

- a. Pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya;
- b. Pendataan lowongan kesempatan kerja;
- c. Pemberian bimbingan kepada pencari kerja lulusannya untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri;
- d. Penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai **persediaan tenaga kerja**;
- e. Pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dan pengiriman serta penempatan yang telah dilakukan; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan **Pameran Bursa Kerja (Job Fair)** dan kegiatan sejenisnya.

Syarat Pendirian BKK

1. Menyampaikan surat **Permohonan Persetujuan Pendirian** yang ditujukan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai domisili BKK yang akan didirikan.
2. Surat Permohonan Persetujuan Pendirian dibuat tembusan dan disampaikan kepada:
 - Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja u.p. Direktur Pengembangan Pasar Kerja.
 - Kepala Instansi bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi sesuai domisili BKK yang akan didirikan.
3. Surat Permohonan Persetujuan Pendirian BKK dilampiri dengan:
 - Struktur Organisasi dan Nama-nama Pengelolaan BKK.
 - Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melaksanakan kegiatan Antar Kerja.
 - Rencana Penyaluran Tenaga Kerja selama 1 tahun.
 - Copy Surat Izin Pendirian dan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja dari instansi yang berwenang.
 - Sertifikat Pemandu Penyelenggara Bursa Kerja Khusus/Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus.

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus.

SMK Rujukan Hasilkan SDM Terampil dan Berdaya Saing Tinggi

SMK sebagai lembaga pendidikan yang siap menghasilkan lulusan terbaik, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik tingkat nasional ataupun internasional. Kemendikbud terus berupaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dengan berbagai terobosan baru, salah satunya adalah merintis pengembangan model sekolah menengah kejuruan baru yakni SMK Rujukan.



Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 mengamanatkan salah satu programnya adalah setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model. Dalam mewujudkan rencana tersebut diperlukan sebuah pembinaan kepada SMK yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dikembangkan menjadi SMK Rujukan.

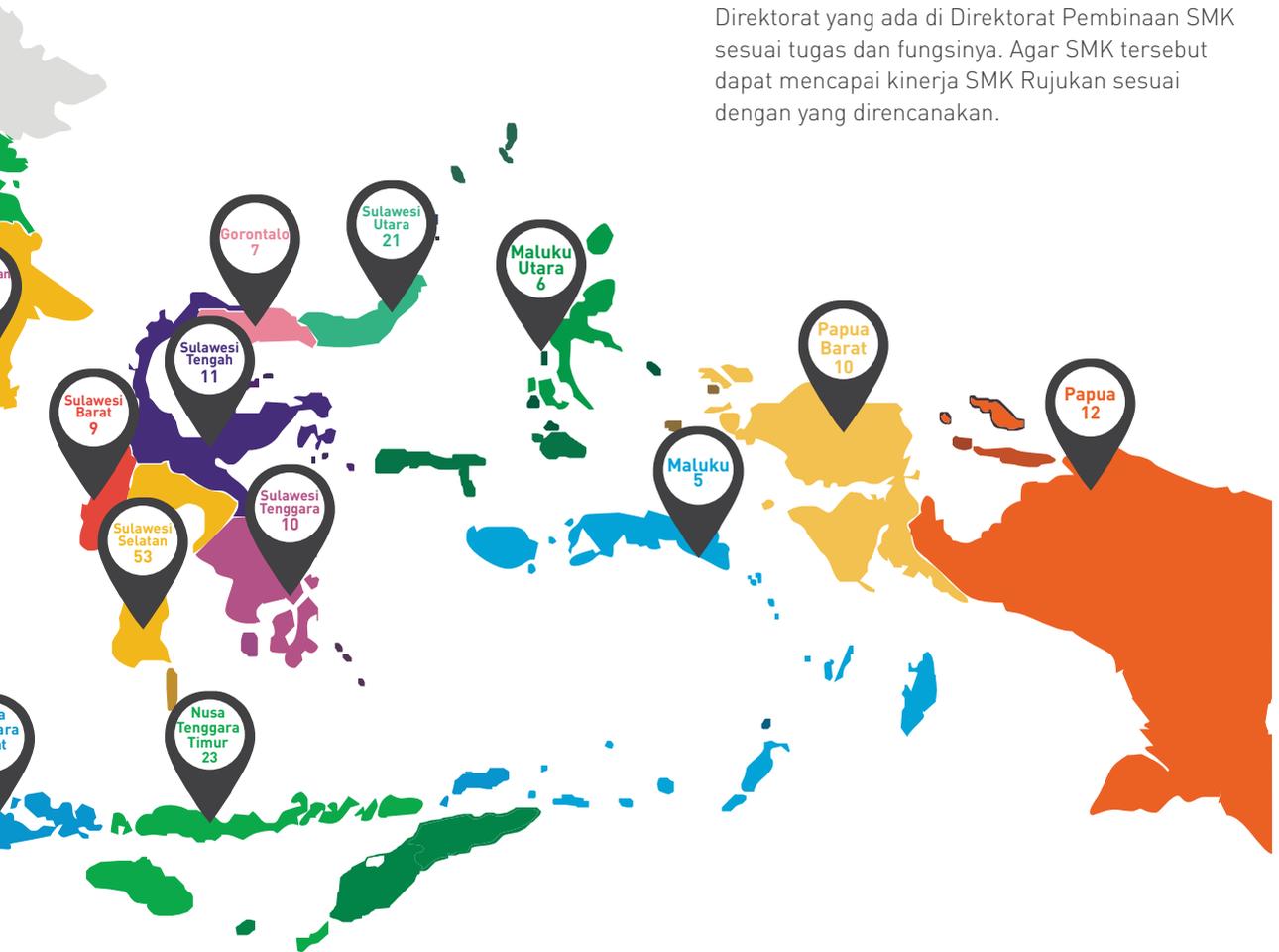
SMK Rujukan merupakan suatu model sekolah yang dapat dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di sekitarnya, dan wajib memiliki 3 sampai dengan 4 aliansi sekolah kejuruan. Sebagai sekolah rujukan sekolah menengah kejuruan tersebut harus memiliki kinerja unggul, akses besar, dan efektif dalam mengelola institusi, serta mendampingi SMK aliansinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran bermutu.

Kriteria SMK Rujukan adalah memiliki peserta didik lebih dari 1000 siswa, guru yang produktif sekitar 75 orang, lahan yang siap dikembangkan lebih dari 5000 m², memiliki jaringan kerja sama dengan lebih dari 100 perusahaan industri. Selain itu juga, sekolah menengah kejuruan tersebut memiliki fasilitas sarana dasar yang baik, letak sekolah yang strategis, kinerja baik khususnya dalam bidang kebecerjaan dan nilai ujian nasional (UN), memiliki fasilitas dan kemampuan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan memiliki siswa yang berkarakter baik.

Peran dan fungsi dari keberadaan SMK rujukan ini sebagai gambaran SMK yang unggul, efektif, dan memiliki banyak akses industri. Selanjutnya juga memiliki fungsi sebagai tempat TUK dan ujian teori kejuruan secara daring, sebagai pusat SMK berbasis TIK, sebagai pusat pengembangan bahan ajar SMK, sebagai pusat promosi lulusan SMK. SMK Rujukan juga memfasilitasi pendampingan peningkatan mutu guru SMK aliansi, dan memberikan pendampingan bagi Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri dan Swasta.

Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Nomor 705/D5.2/K-P/2016 tentang Penetapan SMK Yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Menjadi SMK Rujukan, tahun ini telah menetapkan sebanyak 1656 SMK yang memiliki potensi menjadi SMK Rujukan.

Surat keputusan tersebut menyapaikan bahwa pembinaan SMK yang berpotensi menjadi SMK Rujukan merupakan upaya yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, berkesinambungan dan perlunya melakukan sinergi antar Sub Direktorat yang ada di Direktorat Pembinaan SMK sesuai tugas dan fungsinya. Agar SMK tersebut dapat mencapai kinerja SMK Rujukan sesuai dengan yang direncanakan.



SMK Rujukan memiliki fasilitas lengkap dan dapat digunakan bersama, seperti bengkel standar sesuai dengan program keahlian yang dimiliki, sumber belajar atau materi belajar secara daring dan penggunaan laman sebagai tempat pelatihan guru. Kemudian juga memiliki perpustakaan dengan penyajian buku yang lengkap, memiliki bengkel unggulan untuk praktik bersama, memiliki internet yang cukup dengan server bahan ajar. Tidak hanya lengkap secara fasilitas, SMK Rujukan juga sebagai tempat pendampingan dan pelatihan guru, *Teaching Factory*, *testing center* untuk kompetensi, produk dan jasa, serta ruang pameran produk atau jasa SMK, dan hubungan industri.

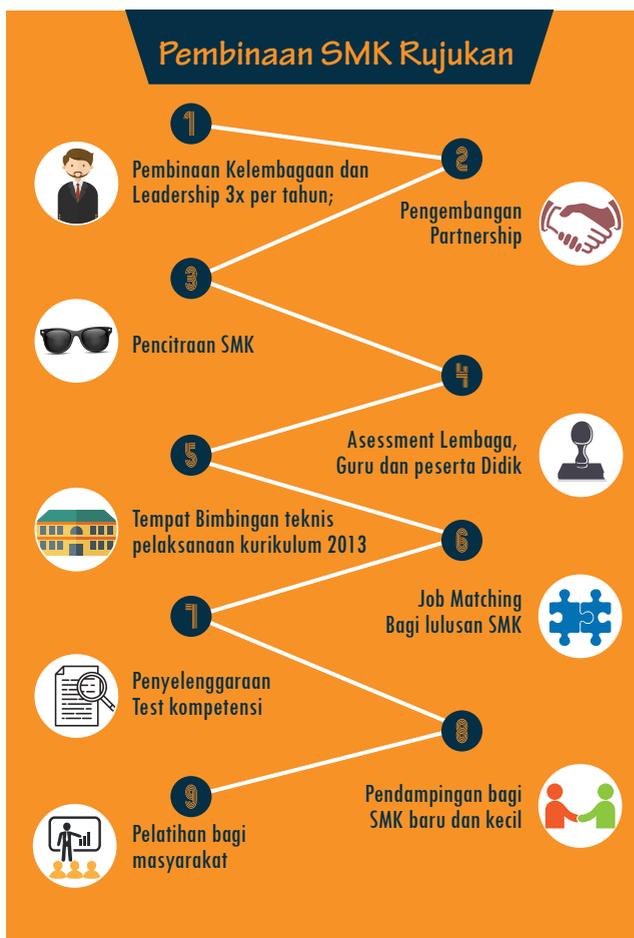
Contoh SMK Rujukan

Salah satu sekolah yang terpilih menjadi SMK Rujukan adalah SMK Negeri 1 Tuban, Provinsi Jawa Timur. SMK tersebut memiliki program unggulan yakni menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2015, mengembangkan sikap dan kompetensi keagamaan sebagai basis karakter siswa, mengembangkan pembelajaran berbasis IT, menjadi Sekolah Rujukan dengan jumlah sekolah aliansi minimal 5, melaksanakan UN Berbasis Komputer, menjadi LSP kompetensi keahlian otomotif.

Bagian terpenting dari keunggulan SMK Negeri 1 Tuban yang menjadi SMK Rujukan adalah telah bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyalurkan tamatan minimal 65 persen dari jumlah lulusan, pembelajaran mandiri yang intensif menyiapkan tamatan diterima di Perguruan Tinggi Negeri minimal 15 persen dari jumlah lulusan, dan mengembangkan bisnis center untuk menyiapkan tamatan menjadi wirausaha minimal 20 persen dari jumlah lulusan.

Pemerintah akan terus kembangkan pendidikan kejuruan di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, agar para generasi muda akan menjadi unggul baik nasional ataupun internasional. Pengembangan pendidikan kejuruan tersebut dituangkan dalam *School Development Plan* (SDP) dengan pendekatan paradigm baru dalam perencanaan pengembangan SMK.

Pendekatan melalui SDP tersebut yakni program pengembangan yang diusulkan harus berbasis kinerja (*performance based activity*) dengan menempatkan implikasi pengembangan pada peningkatan mutu



pendidikan sebagai capaian utama dibandingkan dengan investasi (bangunan atau peralatan yang dibutuhkan), mempertimbangkan efisiensi dan keefektifan pemanfaatan dana dengan mengukur pencapaian sasaran dengan indikator kinerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program, dan mempertimbangkan keberlanjutan program pengembangan yang telah dianggap berhasil selama 4 tahun mendatang.

Dengan berbagai pengembangan terhadap sekolah menengah kejuruan, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, memiliki kepemimpinan tinggi, disiplin, profesional dan terampil di bidangnya. Dengan begitu lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja siap pakai, dan berprestasi di bidang kerjanya. [*]



Dari Pinggiran
Merajut
Budaya Nasional

Budaya Indonesia sungguh beragam. Tidak hanya yang sudah dikenal masyarakat luas bahkan dunia, tetapi juga budaya lokal yang dimiliki masyarakat dari daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air. Begitu beragamnya budaya nasional Indonesia, maka perlu upaya pelestarian, pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, termasuk “rasa memiliki” terhadap budaya itu sendiri. Tema Pekan Budaya Indonesia (PBI) 2016: “Dari Pinggiran Merajut Budaya Nasional”, berusaha menampilkan ekspresi-ekspresi budaya dan kesenian yang nyatanya kini banyak dipinggirkan.

Seni visual jalanan merupakan medium yang akrab dengan masyarakat umum. Sayangnya jenis seni kreativitas ini kurang mendapat tempat. Ia dianggap “menggangu” karena kesan “mengotori” fasilitas umum. Padahal seni visual jalanan dapat menjadi media yang tepat untuk menyalurkan hobi, pembelajaran politik, aspirasi, dan lainnya.

Seni visual jalanan inilah yang menjadi salah satu bagian dalam Pekan Budaya Indonesia (PBI) 2016 dengan tema “Dari Pinggiran Merajut Budaya Nasional”. Ini juga merupakan kekayaan dari budaya nasional Indonesia. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid menjelaskan, tema tersebut sesuai dengan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun dari pinggiran.

“Kita di sini berusaha mengumpulkan ekspresi budaya, ekspresi kesenian, yang memang nyatanya kini banyak dipinggirkan. Kalau kita lihat di televisi, misalnya, jarang sekali kita lihat pertunjukkan kesenian seperti ini. Kalau kita lihat tempat-tempat pertunjukan kurang sekali kita lihat penghargaan dan apresiasi terhadap seni tradisi semacam ini,” ungkap Hilmar.

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Kebudayaan fokus untuk mengangkat kembali seni dan budaya yang selama ini banyak ditinggalkan, dilupakan, diabaikan, dipinggirkan. “Dan keinginan kita adalah membawanya kembali ke tengah. Untuk itulah Pekan Budaya Indonesia ini diselenggarakan,” ujarnya.

Pekan Budaya Indonesia merupakan upaya pemerintah menjaga dan mengenalkan khasanah budaya adiluhung yang dimiliki Indonesia kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya nasional dengan rangkaian kegiatan yang menyenangkan.





PBI digelar untuk menunjukkan dan mengenalkan budaya kepada masyarakat luas. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsa, dan menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan toleransi antarsesama anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tema "Dari Pinggiran Merajut Budaya Nasional" diangkat karena bersinergi dengan keinginan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan PBI 2016. Kali ini pemerintah ingin memastikan jika seluruh masyarakat bisa mengakses penuh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Maka, pendekatan-pendekatan yang lebih personal kepada masyarakat juga diterapkan pada berbagai kegiatan, agar masyarakat tidak hanya merasa menjadi 'penonton', tetapi juga sebagai pelaku 'budaya'.



Seni visual jalanan atau mural dapat menjadi media yang tepat untuk menyalurkan hobi, pembelajaran politik, aspirasi, dan lainnya. Seni mural ini dipertunjukkan dalam Pekan Budaya Indonesia yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, September 2016.

Tema “dari pinggiran”, kata Hilmar, juga bukan hanya secara geografis dan sosial, tetapi juga dimaksudkan mengajak kalangan disabilitas yang seringkali tidak mendapat ruang yang cukup di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, dalam PBI kali ini, grup musik yang anggotanya adalah kalangan disabilitas menunjukkan kebolehannya berkesenian. “PBI adalah ruang bagi kita semua,” tegas Hilmar.

Selain dengan menyaksikan, masyarakat juga terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan yang digelar selama PBI berlangsung. Mulai dari permainan tradisional, workshop, pameran-pameran, dan ragam kegiatan lainnya, sehingga masyarakat mendapat pengalaman seni dan budaya yang nyata.

Salah satu pameran yang ada dalam PBI 2016 mengangkat tema yang sangat penting terkait poros maritim yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, yaitu Pameran Jalur Rempah. Pameran ini menunjukkan bahwa sesungguhnya negeri ini terbentuk dari sambung menyambung dari masa lalu yang panjang karena adanya rempah-rempah. “Nah kita ingin membangkitkan kembali ingatan dan kesadaran mengenai sejarah yang panjang ini dan melihat kita sebagai kesatuan yang sudah lama,” tuturnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, kepribadian masyarakat ini adalah kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan kumpulan dari puncak-puncak

“Kepribadian bangsa Indonesia merupakan kumpulan dari puncak-puncak kebudayaan daerah, keunggulan, kearifan, dan kecerdasan lokal yang kemudian diangkat menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.”



Sejumlah siswa sedang menghias topeng dalam kegiatan Pekan Budaya Indonesia yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, awal September 2016.

kebudayaan daerah, keunggulan, kearifan, dan kecerdasan lokal yang kemudian diangkat menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk itu, Mendikbud mengajak para budayawan dan seniman mendatangi sekolah-sekolah dan sanggar-sanggar belajar, untuk mengenalkan budaya luhur bangsa kepada siswa serta anak-anak lainnya.

Mendikbud percaya, anak-anak yang dididik menjadi insan yang berbudaya akan menghasilkan

generasi bangsa yang tahan banting, berkepribadian kuat dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Sebaliknya, jika tidak dididik budaya, maka yang akan terjadi adalah generasi yang rapuh, lembek, dan pecundang. "Dan akhirnya negara kita yang besar ini akan menjadi jajahan negara yang lain," tutur Mendikbud.

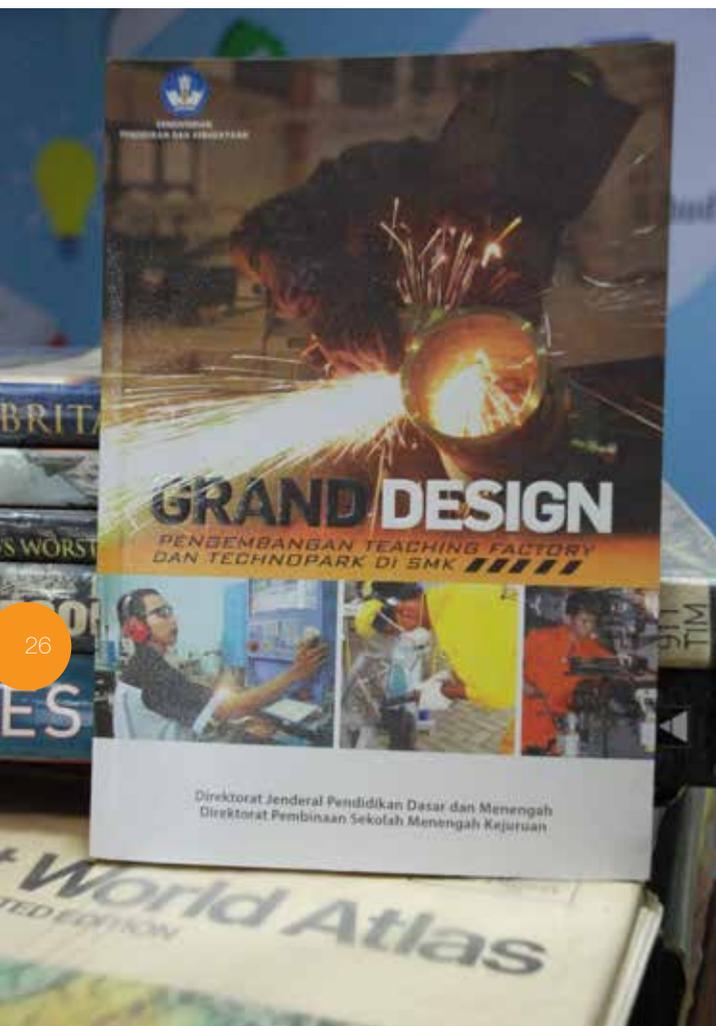
Penyelenggaraan PBI diharapkan menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap budaya dan

memahami keberagaman budaya nasional yang merupakan "rajutan" dari khasanah budaya di setiap daerah di Indonesia. Dengan demikian masyarakat akan dapat menghargai dan menjaga diversitas budaya di Indonesia, sehingga semboyan Bhineka Tunggal Ika dapat betul-betul diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)



Resensi Buku

Menuju SMK yang Siap Bersaing Secara Internasional



Judul Buku : *Grand Design* Pengembangan *Teaching Factory* dan *Technopark* di SMK

Penulis : Arie Wibowo Kurniawan, S.Si., M.Ak. (Ketua)

Editor : Arie Wibowo Kurniawan, S.Si., M.Ak.

Tri Haryani, S.Pd.

ISBN : 9786027223616

Penerbit : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun Terbit : 2016

Halaman : 200 hlm

Bahasa : Indonesia

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 membuat persaingan antar negara semakin ketat. Indonesia dihadapkan pada persaingan penyediaan tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, pariwisata dan lapangan kerja di negara-negara anggota MEA.

Para pencari kerja asal Indonesia kini tidak hanya bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan dari sesama pencari kerja dari negaranya sendiri, melainkan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kran persaingan global yang dibuka seluas-luasnya, menuntut seseorang memiliki kompetensi dan kecakapan kerja yang memadai sehingga mampu memenangi kompetisi.

SMK sebagai satuan pendidikan formal pencetak tenaga kerja terampil kini dituntut lebih agar mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni. Untuk itulah program *teaching factory* dan *technopark* di SMK dikembangkan. Salah satu tujuan utama program tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga berdampak kepada penguatan daya saing industri di Indonesia. Para lulusan SMK juga diharapkan tidak hanya kompeten dari sisi keterampilan, namun juga produktif dan bersikap baik/tahan banting.

Buku yang disajikan dalam tujuh bab ini diawali dengan ulasan mengenai latar belakang mengapa program *teaching factory* dan *technopark* di SMK perlu dikembangkan. Kondisi SMK dari tahun ke tahun juga dikupas dalam bentuk data, tabel, grafik yang menarik. Pada bab berikutnya, dijelaskan mengenai konsep *teaching factory* dan *technopark* yang dimaksud, lengkap dengan ilustrasi dalam bentuk matriks.

Buku yang dilengkapi dengan foto-foto kegiatan praktik beragam bidang keahlian di SMK ini juga menyuguhkan strategi implementasi *teaching factory* dan *technopark* di SMK. Selain dalam bentuk penjelasan tertulis, kerangka strategi implementasi ini juga disajikan dalam bentuk gambar dan infografis menarik untuk mempermudah pemahaman pembaca.

Pada bagian penutup, disebutkan bahwa buku ini disusun untuk membantu Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan *teaching factory* dan *technopark* di SMK. Pengembangan program ini diharapkan menjadi solusi mengatasi daya saing bangsa terhadap berbagai tantangan, permasalahan, dan kendala, serta meningkatkan kemandirian bangsa. (*)



PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD

PINDAH SEMENTARA KE

GEDUNG "C" LT.3

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



27

Perpustakaan Kemdikbud pindah sementara karena tengah direnovasi untuk mendukung layanan perpustakaan lebih baik. Fasilitas baru yang tersedia, di antaranya:

Perubahan	Saat Ini	Akan Datang
Luas Ruang Koleksi dan Baca (lt. 2)	549m ²	607m ²
Luas Ruang Staf (& toilet)	202	144m ²
Luas Ruang Koleksi Anak	55m ²	66m ²
Kapasitas Pemustaka	284	380
Ruang Kelas	1 (bisa di pecah 2)	2 (bisa dipecah 3)
Ruang Meeting Kecil	Tidak Ada	2 (bisa dipecah 4)
Kapasitas Toilet	2	4
Akses untuk Difable	Tidak Ada	Ada
Ruang Menyusui	Tidak Ada	Ada
Area Pameran	Tidak Ada	Ada

LOKASI SEMENTARA:

Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 3. Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 - Indonesia Telp. +62 21 5707870 Faks. +62 21 5731228 perpustakaan@kemdikbud.go.id

-  perpustakaan.kemdikbud.go.id
-  Perpustakaan Kemdikbud
-  Perpusdikbud
-  Perpustakaan dikbud

Pengembangan Program Studi Keahlian di SMK Sesuai Kegiatan Ekonomi Utama pada Enam Koridor Ekonomi

Oleh: Siswantari
Peneliti pada Badan Pengembangan dan Penelitian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan, SMK memiliki beragam program studi keahlian. Sayangnya, di sejumlah daerah, program studi keahlian yang dibuka terkadang tidak disesuaikan dengan potensi daerah tempat SMK itu berada. Padahal jika pengembangan program studi keahlian di SMK dilakukan, kegiatan ekonomi utama yang menjadi andalan daerah tersebut dapat tumbuh dengan baik.

Tujuan studi ini yaitu menganalisis program studi keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang perlu diselenggarakan dan menemukan pola pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi serta program studi keahlian dan kompetensi keahlian untuk tingkat kabupaten/kota yang sesuai dengan kegiatan ekonomi utama (KEU). Studi ini menggunakan metode survei dan diskusi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

Pengumpulan data primer yang berupa program studi keahlian untuk pengembangan 20 kegiatan ekonomi utama dilakukan melalui diskusi dengan asosiasi bidang kegiatan ekonomi utama. Data sekunder berupa program studi keahlian yang diselenggarakan di 13 provinsi sampel dikumpulkan melalui angket terhadap kepala bidang pendidikan menengah dinas pendidikan provinsi.

Adapun ketiga belas provinsi sampel tersebut meliputi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.



Berdasarkan analisis diketahui bahwa pola pengembangan program studi keahlian yang sudah dilakukan untuk program studi keahlian di tingkat provinsi dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi dan pengembangan program studi keahlian dan kompetensi keahlian di tingkat kabupaten/kota. Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kajian ini menyimpulkan bahwa program studi keahlian yang diselenggarakan di 13 provinsi ternyata belum sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan KEU, sehingga perlu dibuka di SMK di setiap provinsi tersebut. Jumlah program studi keahlian terbanyak yang perlu dibuka yaitu 11 terdapat di Sumatera Selatan, NTB dan Maluku serta jumlah terendah, yaitu satu program studi keahlian berada di Jawa Barat yaitu Teknik Plambing dan Sanitasi.

Teknik Plambing dan Sanitasi dikategorikan sebagai program studi keahlian langka, karena semua provinsi sampel belum membukanya, padahal dibutuhkan untuk pengembangan KEU. Selanjutnya, pola pengembangan program studi keahlian yang perlu diselenggarakan di tingkat provinsi dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi dan/atau pengembangan program studi keahlian dan/atau pengembangan kompetensi keahlian di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan simpulan disarankan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pemerintah kabupaten/kota perlu menindaklanjuti pengembangan program studi keahlian dengan mempertimbangkan antara lain: potensi alam atau potensi daerah

maupun produk unggulan kabupaten/kota tersebut, minat masyarakat dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi. Ini diperlukan karena kewenangan pembukaan bidang studi keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian maupun pembukaan SMK baru berada di dinas pendidikan kabupaten/kota.

Kedua, koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi diperlukan mengingat program-program MP3EI cenderung bergerak top down yaitu dari Pemerintah (pusat), provinsi, dan berlanjut ke kabupaten/kota.

Ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perlu menyosialisasikan ke SMK dan masyarakat tentang pengembangan program studi keahlian dan/kompetensi keahlian sesuai keunggulan ekonomi lokal. Masyarakat, khususnya orang tua lulusan SMP/MTs/ sederajat perlu mengetahui berbagai pertimbangan terkait pembukaan program studi keahlian dan/ kompetensi keahlian yang mungkin tidak mengikuti trend di masyarakat. Hal ini diperlukan karena akhir-akhir ini sebagian besar orangtua dan siswa lulusan SMP/MTs/ sederajat yang ingin menyekolahkan anaknya/bersekolah di SMK mengikuti trend di masyarakat, seperti program studi keahlian multimedia.

Keempat, Dinas Pendidikan Provinsi perlu menyosialisasikan upaya mengembangkan program studi keahlian dan/ kompetensi keahlian dengan mempertimbangkan keunggulan ekonomi wilayah masing-masing ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan menghimbau untuk menindaklanjutinya. (*)

Artikel selengkapnya dapat diakses melalui <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/182>





Padanan Kata

AUTO SHIPPING

Padanan:
Pengangkutan
Kendaraan
Bidang Ilmu:
Transportasi

Blind Code

Padanan:
Sandi buta
Bidang Ilmu:
keuangan

BRUSCHETTA

Padanan: Brusketa
Bidang Ilmu: Tata boga

Daddy Shift

Padanan: Pergeseran
peran ayah
Bidang Ilmu: Sosiologi

Elevated Garden

Padanan: Taman terangkat
Bidang Ilmu: Arsitektur

Charaben

Padanan: Karaben
Bidang Ilmu: Tata boga

fixative

Padanan: Fiksatif
Bidang Ilmu: Kimia

Flooring

Padanan: Bahan lantai
Bidang Ilmu: Arsitektur

Hagiography

Padanan: Hagiografi
Bidang Ilmu: Sastra

Guinea Pig

Padanan: Kelinci percobaan
Bidang Ilmu: Pendidikan

ICE CARVING

Padanan: Pahatan es
Bidang Ilmu: Seni

lift Chair

Padanan: Kursi angkat
Bidang Ilmu:
Teknik mesin

Senarai Kata Serapan

Bentuk Serapan	Bentuk Asal	Asal Kata	Arti
Jahil	Jāhil	Arab	a 1 bodoh; tidak tahu (terutama tt ajaran agama); para ulama berkewajiban menuntun golongan -- dan bebal; 2 cak jail
Behandel	Behandelen	Belanda	v cak, mem-be-han-del v mengerjakan sampai selesai (tt surat, urusan, dsb); menggarap
Distingsi	Distinction	Inggris	n perbezaan: memang ada -- arti antara cantik dan molek
Tambur	Tambor	Portugis	n alat musik pukul, berbentuk bundar, dibuat dr kulit yg diberi berbingkai; genderang: barisan pemukul -- berjalan paling depan
Cemeti	Carmayasti	Sansekerta-Jawa Kuna	cambuk; pecut; -- dewa ki petir; -- malaikat cemeti dewa;
Pawai	pāvai	Tamil	n 1 iring-iringan orang, mobil, kenderaan, dsb; perarakan: untuk meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan, pemerintah mengadakan -- kenderaan bermotor; 2 alat-alat kerajaan

Penulisan Kata Yang Tepat

Kata yang Sering Digunakan	Penulisan Kata yang Benar	Arti Kata
Agamis	Agamawi Agamais	(a) Bersifat agama; religius: bangsa kita adalah bangsa yang ~
Amphibi	Amfibi	<ol style="list-style-type: none"> 1. binatang berdarah dingin yang dapat hidup di air dan di darat, misalnya katak 2. n benda yang dapat berfungsi di air dan di darat 3. n pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat, baik di darat maupun di air: pesawat ~
Kadaluarsa	Kedaluwarsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. a tidak model lagi (baju, kendaraan, dsb); tidak sesuai dengan zaman: hakikat cerita itu telah ~ apabila diajarkan sekarang 2. (a sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dsb); habis tempo 3. a terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan): jika dimakan, makanan yang ~ akan membahayakan kesehata
Cemilan	Camilan	(n) makanan kecil (kue, kolak, dsb); panganan; kudapan: untuk ~ disediakan buah segar, kacang-kacangan, dsb
Apotik	Apotek	(n) toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis; rumah obat
Disain	Desain	<ol style="list-style-type: none"> 1. (n) kerangka bentuk; rancangan: ~ mesin pertanian itu dibuat oleh mahasiswa fakultas teknik 2. (n) motif; pola; corak: ~ batik Indonesia banyak ditiru di luar negeri
Atlit	Atlet	(n) olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan)
Antri	Antre	<ol style="list-style-type: none"> 1. (v) berdiri berderet-deret ke belakang menunggu untuk mendapat giliran (membeli karcis, mengambil ransum, membeli bensin, dsb) 2. (n) antrean

Sejumlah Layanan di Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud dapat diakses melalui:

Peta SMK

Aplikasi pemetaan antara SMK dan dunia industri.

psmk.kemdikbud.go.id/peta

Pengajuan bantuan SMK 2017

Pengajuan untuk bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB) melalui proposal elektronik yang terintegrasi dengan data pokok pendidikan (dapodik).

psmk.kemdikbud.go.id/verwil

Bursa Kerja Khusus

Aplikasi sistem informasi bursa kerja khusus untuk lulusan SMK

psmk.kemdikbud.go.id/bkk

Data Pokok Pendidikan SMK

Informasi mengenai data SMK seluruh Indonesia

psmk.kemdikbud.go.id/datapokok

Beasiswa

Portal yang memuat informasi beasiswa bagi peserta didik SMK. Terdiri atas beasiswa prestasi, beasiswa khusus, kewirausahaan, dan Program Indonesia Pintar

psmk.kemdikbud.go.id, kemudian klik "beasiswa"

Lomba dan Festival

Berisi informasi mengenai berbagai lomba yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK dan diikuti oleh peserta didik SMK.

psmk.kemdikbud.go.id, kemudian klik "lomba & festival"

The background is a teal color filled with a repeating pattern of white school-related icons. These icons include books with 'A+', '123', and 'ABC' on them; lightbulbs; globes; paper airplanes; pencils; compasses; scissors; paint palettes; and the phrase 'back to school'.

S SMK Bisa.
SMK Hebat.

ISSN: 2502-7867



9 772502 786041